

REVOLUSI DAN DISINTEGRASI: DARI RUSIA, UNI SOVIET, AKANKAH KE INDONESIA?*

Oleh: Indriyanto**

A. Pengantar

Rusia adalah sebuah negeri besar, apalagi setelah menjadi Uni Soviet, dengan memiliki pengaruh yang luas di sebagian wilayah dunia. Sejarah negerinya yang lama, telah memberikan arti penting dalam perkembangan ilmu sejarah sosial, politik, ekonomi, dan budaya baik untuk Rusia sendiri, Uni Soviet, Asia, dan Eropa. Revolusi Rusia 1917 merupakan Revolusi Besar yang berpengaruh pada belahan dunia ini, sehingga menjadi kajian para ilmuwan yang sangat menarik. Ketika Uni Soviet mengalami kemunduran ekonomi, negara ini mencoba untuk melihat kembali prinsip-prinsip dasar ideologinya. Di bawah kepemimpinan Gorbachev, Uni Soviet berusaha untuk bangkit menjadi negara yang besar di dunia tetapi sekaligus juga menjadi negara yang lebih demokratis. Dengan digelindingkannya Perestroika dan Glasnot oleh Gorbachev, banyak sekali terjadi perubahan di negeri ini. Tampaknya keinginan Gorbachev untuk menjadikan Uni Soviet menjadi negara maju justru menjadi sebaliknya dengan terjadinya disintegrasi negeri adidaya ini hingga terpecah-pecah menjadi negara-negara yang memiliki kemerdekaan sendiri-sendiri, sekaligus mengakhiri Era Perang Dingin antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat.

Bagi Indonesia, peristiwa revolusi dan dampaknya yang terjadi di Rusia dan disintegrasi yang terjadi di Uni Soviet patut untuk dikaji, direnungkan, dan dipelajari untuk dijadikan cermin bagi kelangsungan bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Mengapa? Karena kejadian-kejadian itu mempunyai pola-pola dan kecenderungan yang bisa dipelajari sehingga apabila pola dan kecenderungan itu terjadi di Indonesia, maka peristiwa serupa juga dimungkinkan akan terjadi di Indonesia.

Bangsa dan negara Indonesia yang masih mengalami krisis multisegi yang bekepanjangan ini, masih harus menghadapi berbagai gejala dan guncangan pergolakan sosial dalam bentuk kerusuhan dan kekerasan masyarakat yang cenderung menjurus ke arah terjadinya disorganisasi sosial dan disintegrasi masyarakat dan bangsa Indonesia yang majemuk ini. Tantangan disorganisasi sosial dan disintegrasi bangsa semakin terasa ketika situasi konflik semakin meningkat dalam bentuk benturan sosial dengan aksi kekerasan yang bersifat brutal dan destruktif disertai isu-isu konflik bermuatan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Peristiwa kerusuhan seperti itu terjadi misalnya di Jakarta dan Solo pada Juni 1998, Jawa Timur 1998, Ambon dan Maluku (1988-sekarang), Kalimantan Barat (1998/1999), Aceh (1998-sekarang), Poso (2000), dan di Jakarta pada akhir-akhir ini seperti aksi peledakan bom, demonstrasi dengan kekerasan dan perusakan, dan lain-lain. Aksi-aksi kerusuhan dan kekerasan ini cukup mengguncang masyarakat di samping menimbulkan kecemasan dan ketakutan masyarakat karena sifatnya yang destruktif. Lebih-lebih dengan banyaknya aksi-aksi penjarahan, pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, pembakaran, perusakan tempat tinggal dan tempat ibadah di daerah-daerah tertentu, telah menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia terkena imbas gejala “budaya ketakutan” (*Culture of Fear*) dan “budaya terror” (*Culture of Terror*). Timbulnya kedua gejala tersebut telah menandai bahwa masyarakat sedang dilanda krisis. Selain itu, kecemasan terjadinya disintegrasi, pada dasarnya juga diperkuat oleh peristiwa keruntuhan Soviet Rusia pada akhir Perang Dingin (1990). Disintegrasi Uni Soviet menjadi cermin bagi Indonesia, yang secara kebetulan memiliki kemiripan dengan Rusia terutama dari segi pluralitas masyarakatnya.[1]

B. Setting Historis

Sejak abad ke-16 Rusia mulai mendorong perbatasannya ke arah Asia, melalui ekspedisi dagang di bawah perlindungan negara ke Siberia Timur, Pasifik, dan Lembah Amur. Wilayah Asia yang paling banyak dicaplok adalah Cina, sekitar 1,5 juta km². [2] Sejak abad ke-17 Rusia menjadi semakin Eropa dengan arogansi kolonialis [3] yang menjadi ciri negara-negara Eropa Barat. [4] Setelah mengalahkan Swedia dalam “Great Northern War” (1700-1721) Rusia semakin menjadi kekaisaran yang multi-etnis dan menjadi negara besar dalam sistem negara-negara di Eropa. [5] Dilihat dari sudut geopolitiknya, kepentingan Rusia adalah mengontrol pintu masuk ke

laut hitam.[6] Sejak abad ke-18-19 keterlibatan Rusia di Asia semakin mendalam, meskipun tidak disenangi orang-orang Eropa dan tidak diterima sebagai Eropa. Pada abad ke-20 (1940-an), Rusia memperluas jajahannya di Baltik, Finlandia, Jerman, Polandia, Cekoslovakia, Rumania, Mongolia, dan Jepang (Kepulauan Kurile, Habomai, dan Shikotan). Kemenangan kaum Bolshevik pada Revolusi 7 November 1917 tidak mengubah kebijakan Rusia atas Asia, meskipun salah satu asas politik luar negeri Bolshevik adalah melawan imperialisme dan kolonialisme. Hal ini ditunjukkan oleh Lenin yang menandatangani “Deklarasi Hak-hak Bangsa-bangsa Rusia” yang menjamin bangsa-bangsa bekas imperium Tsar membentuk negara merdeka. Ia mengakui hak bangsa-bangsa atas penentuan diri tetapi tidak pernah menginginkan pelaksanaannya karena tujuan utama Lenin adalah mendirikan negara sebesar mungkin (Rusia Raya). Lenin menggunakan hak penentuan diri sebagai taktik, yakni menggalakkan disintegrasi bangsa-bangsa jajahan Rusia (Masa Tsar) untuk mempercepat proses revolusioner. Lenin yakin, setelah terjadi disintegrasi bangsa-bangsa itu akan dengan sukarela bergabung ke dalam Rusia yang telah mengalami revolusi sosialis. Rupanya Lenin tidak pernah menggunakan ideologi yang selama hampir 70 tahun Marx dan Engels menyebut dengan istilah “sosialisme ilmiah”. Lenin sejak berhasil memimpin Revolusi Bolshevik akhir tahun 1917 dan juga Stalin menerjemahkan istilah tersebut ke dalam praktek. Oleh karena itu, ideologi Komunis sebenarnya baru dilahirkan setelah Partai Bolshevik, fraksi mayoritas yang memisahkan diri dari Partai Buruh Demokrat Rusia, untuk selanjutnya berdiri sendiri sebagai partai, mulai memegang kendali pemerintahan di Rusia. Selanjutnya lima tahun setelah mengeluarkan Manifesto Partai Komunis, Marx dan Engels mengganti istilah humanisme dengan Komunisme.[7]

Kebesaran Rusia dengan Uni Sovietnya semakin menjadi nyata, sehingga negara ini telah “ditakuti” oleh negara-negara Barat terutama Amerika Serikat. Musuh bebuyutan dan Perang Dingin pun menjadi kepentingan politik dan strategi kedua negara adidaya ini hingga berakhirnya negara Uni Soviet pada tahun 1990.

C. Revolusi Rusia: Kecenderungan, Pola, dan Dampak

Sebelum terjadi revolusi tahun 1917, Rusia merupakan sebuah negara yang dikendalikan oleh Monarki Otokratis, yang tugasnya terpusat pada pemeliharaan tatanan dalam negeri dan penindakan musuh dari luar. Rejim ini sepenuhnya berdasarkan pada negara kekaisaran (Imperial State) yang memiliki hirarkhi militer dan administrasi yang dikoordinasikan secara terpusat di bawah pengawasan monarki yang absolut.[8] Kedudukan kaum bangsawan pemilik tanah di Rusia sangat lemah karena secara politis mereka tergantung pada Tsar. Selain itu perbudakan tidak dikonsolidasikan oleh mereka tetapi oleh utusan Tsar untuk menarik sumber-sumber dari rakyat guna mendukung militer agar mampu mempertahankan dan memperluas lingkungan geopolitik yang terancam.[9] Namun demikian, lama kelamaan mereka pun merasa tertekan dan tertindas, sehingga muncul keresahan dan ketidakpuasan politik di antara mereka.

Selain itu, kekuasaan Tsar yang absolut telah membawa kesengsaraan rakyat dan kelompok-kelompok sosial yang berada di kota menjadi tidak puas dengan kerja negara kekaisaran ini. Pemerintah Tsar mengalami inefisiensi dan inefektif karena terlalu kaku. Akhirnya usaha ke arah merubah sistem politik Tsar semakin nampak di atas permukaan.[10] Sejak abad ke-19 usaha-usaha berbagai kelompok untuk bersikap kritis terhadap pemerintah telah berlangsung meskipun masih bisa dihantam oleh pemerintah. Namun demikian sebenarnya di masyarakat Rusia telah terjadi munculnya kelompok-kelompok kritis khususnya dari kalangan borjuis yang bersikap antipati terhadap pemerintah.

Mereka kemudian mendirikan perkumpulan-perkumpulan tidak resmi dalam kehidupan masyarakat. Apa yang kemudian menjadi objek dalam perkumpulan-perkumpulan sosial itu adalah membicarakan atau memperdebatkan kebijakan pemerintah. Namun yang lebih penting dari aktivitas itu adalah lahirnya konsep-konsep pemikiran baru tentang negara dan sistem sosial, yang kemudian dijadikan landasan untuk melakukan pembaharuan politik dan kehidupan sosial. Kelompok-kelompok ini kemudian menjadi agitator politik dalam konteks menghantam “*the old regime*”. Pergeseran fungsi dari perkumpulan-perkumpulan ini berlangsung yang tadinya hanya bersifat diskusi, kemudian menjadi wadah dan wahana perjuangan untuk menjatuhkan *the old regime*. Crane Brinton menyebut perkumpulan-perkumpulan itu sebagai “*societes de pensee*” yang dalam perkembangannya menjelma menjadi *sel revolusi* Revolusi Rusia yang meletus

pada 1917 juga bermula dari pergerakan dan perkembangan sel revolusi ini, meskipun mereka tidak secara eksplisit menyatukan gerak dan langkah mereka. Mereka adalah kelompok-kelompok sosialis, liberal, kelompok yang pro dan anti Barat, militer, intelektual, dan sebagainya.[11]

Faktor lain yang menjadi sebab terjadinya Revolusi Rusia adalah akibat langsung dari kekalahan Rusia dalam peperangan. Kekaisaran Rusia harus bersaing ketat dengan negara-negara lebih maju di Eropa sehingga perlu reformasi Rusia Prarevolusi. Paling tidak, dari kondisi struktural dan kecenderungan-kecenderungan dalam negeri, ada tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya Revolusi Rusia, yaitu: 1) Ketidakmampuan para aparat pemerintah pusat *the old regime*; 2) meluasnya pemberontakan klas bawah; 3) upaya pemimpin politik yang memobilisasi masa untuk mengkonsolidasikan negara revolusioner.[12] Padahal, suatu revolusi tidak dapat tidak merupakan suatu yang sangat otoriter. Revolusi adalah suatu tindakan dari suatu bagian penduduk untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain dengan jalan kekerasan. Bila si pemenang menghendaki keberhasilan perjuangannya, maka ia harus mempertahankan kekuasaannya dengan jalan terror yang dihadapkan oleh alat senjatanya terhadap golongan reaksioner. Dengan kata lain penguasa dalam revolusi boleh berbuat apa saja, pihak lawan atau yang tidak setuju dianggap sebagai golongan reaksioner atau pun sebagai golongan kontra revolusioner.[13] Itulah sebabnya, produk revolusionernya adalah munculnya negara bangsa yang sentralistis birokratis dan bersifat inkorporasi massa dengan meningkatkan kekuasaan yang lebih besar di tingkat internasional.

Pada saat revolusi berhasil digulirkan, biasanya golongan yang langsung mengambil alih kendali pemerintahan adalah golongan moderat. Mereka adalah golongan kaya, terkenal dan berkedudukan sosial tinggi dan diharapkan dapat menggantikan pemerintahan yang baru. Di Rusia mereka adalah koalisi sosialis (sosialis revolusioner dengan golongan Menshevik dan juga sebagian pengikut Bolshevik). Pada masa “bulan madu” revolusi ini, sesuatu yang hampir selalu terjadi setelah revolusi adalah munculnya pihak-pihak yang tidak begitu sepeham mengenai apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali negeri seperti yang diteriakkan melalui pidato-pidato dan upacara peringatan kemenangan revolusi itu. Golongan moderat ini akan mendapat perlawanan dari golongan ekstrimis radikal yang menuduh golongan moderat sebagai pengkhianat revolusi, menghentikan arus revolusi dan lebih busuk dari penguasa lama. Termasuk dalam golongan yang radikal dan ekstrimis ini adalah kaum Bolshevik. Kondisi kritis pun berlangsung sesaat setelah revolusi berlangsung. Biasanya setelah berlalunya kondisi kritis ini, pihak pemenang cenderung pecah menjadi dua, yaitu: 1) kelompok yang lebih konservatif (golongan moderat) yang memegang pemerintahan; dan 2) kelompok yang lebih radikal sebagai oposisi. Sampai tingkat tertentu, kemenangan ada di pihak oposisi/ kaum radikal.[14] Memang pada masa kritis, telah terjadi paradoks revolusi, yaitu bahwa menguasai mesin pemerintah mengandung kelemahan pada dirinya sendiri. Golongan moderat dianggap lemah karena mereka kehilangan kepercayaan dari sesama lawan rezim lama, dan dihubungkan sebagai pewaris rezim lama yang karena keadaan memaksa mereka dalam posisi mempertahankan. Memang, para penguasa Rusia baru yang belum berpengalaman harus mengatur kegiatan militer dan menanggulangi akibat perang dan kekalahan yang diderita. Itulah sebabnya sejak awal sudah kacau dan memiliki potensi konflik yang mendasar sehingga revolusi tersebut merusak usaha-usaha stabilitas temporer.

Muncul berbagai kesulitan setelah Revolusi 1917 yang semakin parah terutama masalah kereta api: jaringan kereta api yang tidak memenuhi kebutuhan pertempuran dan bahan mentah industri, pemogokan buruh kereta api, tuntutan kenaikan upah, kesulitan para penguasa untuk mempergunakan jalur kereta untuk memerintah negara. Selain itu, perang tidak pernah berhenti karena setiap pemerintahan Rusia tidak pernah mau menarik diri dari perang. Akibatnya ekonomi ambruk karena perdagangan antarnegara tak berjalan. Pemerintah Darurat kehilangan otoritas karena selalu merangsang terjadinya perang, semakin banyak pemberontakan rakyat di daerah, pemogokan buruh, dan pemimpin Soviet kurang mencerminkan hal-hal yang terjadi pada masyarakat bawah. Rakyat Rusia mulai mengatasi masalah sendiri melalui tatanan yang mereka miliki tanpa mengindahkan kelas dominan. Akhirnya muncul kolektivitas-kolektivitas yang dirasakan lebih cocok untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat secara langsung karena pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan harapan rakyat jelata. Bisa disimpulkan bahwa sejak Revolusi Pebruari 1917 dilema Revolusi Rusia yang sesungguhnya adalah *bukan siapa yang harus memerintah melainkan siapa yang mampu memerintah*. [15]

Pada suasana revolusi di manapun akan muncul masalah dwi kedaulatan. Di Rusia hal itu disebut “*dvoevlastie*” (bisa diterjemahkan dengan kekuasaan rangkap). Dwi lembaga ini

muncul bila ada lembaga-lembaga lain dan bertentangan dengan pemerintahan, kemudian membuat keputusan-keputusan lain dan bertentangan dengan keputusan pemerintah. Akhirnya muncullah “pemerintahan tidak sah” dari golongan ekstrimis yang mencoba meruntuhkan golongan moderat ini. Posisi golongan moderat terjepit antara golongan konservatif yang masih punya power dengan golongan ekstrimis yang memiliki tekad dan agresif.[16] Akhirnya kemenangan diraih oleh golongan ekstrimis.

Golongan ekstrimis mendapat kemenangan karena mereka memegang pengawasan terhadap pemerintahan tidak sah dan mengubahnya dalam suatu kudeta atas pemerintahan yang sah. Kunci keberhasilan mereka karena persoalan dwi-keaulatan disesuaikan dengan tindakan revolusioner yaitu memonopoli kekuasaan atas lembaga-lembaga yang telah ada (soviet-soviet)[17] ; disiplin, cara berpikir satu-satunya adalah pemusatan kekuasaan. Organisasi ekstrimis sebenarnya kecil, tetapi mereka mewakili dan melaksanakan apa yang “dikehendaki” oleh jiwa, kemauan, dan semangat bangsa mereka dengan bersemboyan: “Mereka yang menentang pemberontakan adalah setiap orang kecuali golongan Bolshevik, tetapi golongan Bolshevik adalah rakyat”. Perselisihan di antara pemimpin ekstrimis bersifat doktriner. Penyelesaian yang dipilih biasanya berupa judicial murder/ pembunuhan judisial. Perselisihan ini memang tidak tampak di muka umum karena disiplin Bolshevik yang sangat memuaskan.[18]

Memang, menjelang pertengahan tahun 1918, terdapat kerumitan spektrum politik. Berbagai kelompok digambarkan berdasarkan latar belakang politik, sosial, dan psikologi/motivasinya. Kategori ini berkisar dari individu yang paling anti Bolshevik sampai pada mereka yang tergabung dalam Partai Komunis Rusia. Alexandre A. Bennigsen membedakan tipologi kelompok politik tersebut dalam empat kategori, yaitu: 1) Golongan Kontra Revolusi dan Pengikut Rusia Putih. Mereka banyak berasal dari bekas pejabat Tsar, kaum monarkhis, kaum borjuis kaya, tuan tanah dan kaum bangsawan, serta sejumlah pendeta konservatif; 2) Kelompok Netral, Pasif, atau Pindah. Mereka jumlahnya besar dan merasa tidak nyaman hidup dalam gejolak revolutif. Mereka adalah para penganut Pan-Turki dan Pan-Islam, termasuk sejumlah ulama, kaum borjuis kelas menengah; 3) Kawan Seperjuangan, yaitu menunjuk pada individu yang pada suatu saat diputuskan secara subjektif mendukung kaum Bolshevik; 4) Pengikut Partai Komunis Rusia yang kebanyakan terdiri dari kaum ekstrimis, radikal, kaum reformis yang agak moderat. Mereka berkeyakinan kuat bahwa kemenangan akhir akan dipegang oleh golongan Bolshevik.[19]

Melihat keragaman spektrum politik, maka golongan ekstrimis tidak bisa tidak harus melakukan tindakan tegas dengan merealisasikan kediktatoran dan terror. Kediktatorannya diwujudkan dalam bentuk sentralisasi. Bentuk khas kekuasaan tertinggi berwujud komite dan pemerintah terror pada dasarnya adalah kediktatoran komisi.[20] Sementara kekuasaan politik merupakan sebagian dari kekuasaan sosial yang fokusnya ditujukan kepada negara sebagai satu-satunya pihak yang berwenang yang mempunyai “hak” untuk mengendalikan tingkah laku sosial dengan paksaan.[21] Tindak kekerasan serta terror terhadap musuh-musuh politiknya dilancarkan, bahkan bila perlu terhadap rakyat yang sebenarnya harus dilindunginya.[22] Menurut Karl G. Ballestrom, “*terror is a typical aspect of totalitarian dictatorship that particular sosial or racial group of the population are systematically oppressed. Furthermore it is quite logical for a violent regime which justifies its own power by utopian dreams, to anticipate discontent and to react by arbitrary terror*”.[23] Partai Komunis Rusia menguasai pemerintah dengan menciptakan Polisi Rahasia, terror dan pembunuhan politik, pertentangan kelas yang tajam. Secara halus sistem diktator proletariat ini dikatakannya sebagai Sistem Politik Demokrasi Rakyat. Pada masa Stalin totaliterisme partai berubah menjadi totaliterisme negara. Stalin melakukan usaha mengenyahkan lawan dan saingan politik melalui pembunuhan dengan korban mencapai 20-40 juta orang. Komunis sebagai ideologi diindoktrinasi secara paksa melalui terror mental dan fisik dari generasi ke generasi. Ideologi kemudian cenderung diperlakukan seperti agama dan menjadi ideologi tertutup, artinya masyarakat tidak boleh membantah kebenarannya dan tidak boleh menafsirkan atau mengembangkannya.[24] Akhirnya kuasa dijaga dengan pedang, mesiu, dan sejumlah alat pembasmi untuk melenyapkan mereka yang menolaknya atau untuk menerbitkan “gentar”. Pendeknya, kuasa ditegakkan dengan terror dan pengelolaan kengerian.[25]

D. Disintegrasi Uni Soviet: Sebab-sebab dan Pengaruhnya

Jatuhnya sistem Tsar telah menimbulkan reaksi yang campur aduk di Barat, dari yang semula antusias mengharapkan demokrasi, sampai munculnya antisipasi terhadap kediktatoran komunis yang menakutkan. Bagi Amerika Serikat misalnya, dia harus mulai membuat asumsi-asumsi yang realistis tentang kekuatan Uni Soviet dan lingkungan pengaruhnya yang sedang dibangun serta memperlihatkan sasaran-sasaran keamanan negara tersebut.[26]

Perkembangan Uni Soviet yang otoriter salah satunya disebabkan adanya warisan Lenin yang membawa malapetaka, yaitu: 1) Pemusatan kekuatan politik hanya pada beberapa orang; 2) kegiatan/ aktivitas terror untuk mencapai tujuan.

Pemusatan kekuatan politik dilembagakan dalam sebuah Partai Tunggal yang birokratisasi. Selain itu juga dikembangkan sebuah sistem kendali politik yang berlapis-lapis yang dijalankan secara ketat dari lapisan atas sampai bawah. Aktivitas terror diorganisasikan secara rapi oleh partai, ditujukan pada pihak-pihak yang mengganggu jalannya revolusi, dan tidak peduli jika harus melakukan kekerasan kolektif. Kekerasan terorganisasi menjadi alat utama dalam menyelesaikan masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pengutamaan terror mengakibatkan kekejaman-kekejaman kolektif maupun individual yang dibangun oleh para elit Partai Tunggal dan Polisi Rahasia.[27] Sementara itu, ketika Stalin berkuasa, dia mewarisi tradisi otoriter dari pendahulunya Lenin, yang juga membawa kemunduran negara dan bangsa US, antara lain: 1) Partai yang dogmatis; 2) Partai Tunggal yang otoriter yang membangun birokrasi tidak efisien; dan 3) Kekuasaan negara harus tumbuh dan ekspansionis. Pada intinya adalah bahwa kekuasaan negara dicerminkan dengan penggunaan kekerasan yang disponsori oleh negara terhadap masyarakatnya sendiri, munculnya negara polisi yang mematikan kreativitas masyarakat dan intelektual, dan sentralisasi kekuasaan politik. Stalinisme dapat bertahan karena ia adalah sebuah sistem politik tanpa kehidupan politik yang sebenarnya. Leonid Batkin (sejarawan Uni Soviet) dalam Nedelya No. 26 tahun 1988 mengatakan: "...politik telah hilang sejak tahun 1920-an. Politik telah menghilang dari kegiatan kemanusiaan, dimana perbedaan-perbedaan dalam kepentingan kelas dan kelompok diperlihatkan dan berbenturan satu sama lain.[28] Para pemimpin Uni Soviet sebelum Gorbachev merasa optimis dengan kemungkinan peluang USRR menjadi negara No. 1 Dunia yang melampaui musuh bebuyutannya Amerika Serikat. Bahkan, Khrushchev tanggal 4 November 58 mengatakan bahwa lima tahun setelah 1965, tingkat produksi perkapita AS akan disamai dan dilampaui, termasuk dalam volume produksi. Ramalan ini bahkan dijadikan program resmi Partai Komunis Uni Soviet yang diterima pada tahun 1961.[29] Namun demikian kondisi yang diramalkan itu ternyata meleset. Suatu faktor penting yang sangat menentukan adalah adanya pola perilaku politik Rusia sepanjang sejarahnya yang merangkaikan gelombang otokrasi, destabilitas, ketidakmampuan rezim yang berkuasa untuk mereformasi sistem yang berlaku dari dalam, stagnasi politik, ekspansi ke luar Uni Soviet dan akhirnya pemulihan tirani dalam suatu lingkaran setan. Sejak pemimpin Uni Soviet Malenkov, Khrushchev, Kosygin, dan Breznev, sudah berusaha melepaskan diri dari lingkaran tersebut, tetapi tidak satu pun berhasil, kecuali Gorbachev. Itulah sebabnya muncul desakan yang kuat untuk merehabilitasi hubungan dengan dunia barat, dengan dipengaruhi oleh dua perkembangan penting, yaitu perkembangan teknologi senjata yang pesat; dan memburuknya ekonomi Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur serta kesenjangan teknologi yang terus melebar.[30]

Tiga puluh tahun setelah ramalan Khrushchev, kegelisahan sejarah mendominasi pandangan Sekjen Soviet yang baru dan rekan-rekannya karena mereka tidak dapat menghindari kenyataan yang mencemaskan bahwa kesenjangan dengan kapitalis tidak hanya bertambah besar tetapi kekuatan-kekuatan lain akan melampaui Uni Soviet dalam dua atau tiga dasawarsa lagi misalnya Jepang. Tak heran bahwa Gorbachev dalam memacu elite Soviet ke dalam pembaruan kembali secara singkat sistem mereka, membangkitkan hantu kematian komunisme. Gorbachev menggunakan taktik yang berbeda dengan elite lainnya. Dia menggunakan tekanan sosial dengan glasnotnya yang merangsang tidak lain daripada perdebatan yang berlangsung di seluruh negara tentang masa kini dan masa lalu Soviet. Dalam perdebatan itu, hal-hal yang tadinya dianggap keramat dicemarkan di muka umum, masalah

lama yang tadinya disembunyikan sekarang dipeberkan terang-terangan. Yang tampaknya menjadi "suara bulat" negeri Soviet kini menjadi berantakan; di mata beberapa orang sistem komunis diragukan. Selanjutnya kemunduran Uni Soviet menjelang tahun 1990 juga disebabkan karena: 1) kegagalan Perang sembilan tahun di Afghanistan yang menelan biaya besar; 2) kekacauan di Eropa Timur; dan 3) Anggaran militer yang boros sehingga merusak sistem ekonomi Uni Soviet.[31]

Ketika Gorbachev melakukan rekonstruksi sistem ekonominya secara radikal, ia telah mengasingkan kaum buruh, militer, birokrat, dan intelijen Soviet. Padahal, faktor ini merupakan faktor penting bagi terlaksananya perestroika dan glasnot yang digelindingkannya. Pada tahun 1986, Gorbachev terus menerus dikhawatirkan Barat akan segera terguling pemerintahannya. Sikap kooperatif Barat terhadap Soviet (rezim Gorbachev) tidak terdapat di Uni Soviet selama awal tahun-tahun 1960-an menjelang jatuhnya Krushev. Sebagai seorang komunis, Gorbachev menyadari bahwa radikalisme komunisme justru bertentangan dengan tujuan-tujuan komunis itu sendiri dan justru menyulitkan Komunis di dalam pergaulan internasional. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Gorbachev sedang atau telah meninggalkan komunisme. Akan tetapi sebenarnya Gorbachev sedang mengembangkan Komunisme sebagai ideopraxis yang bertumpu pada creative Dialectical Thought. Jadi kemungkinan menjelang abad ke-21 akan lahir komunisme yang diperkaya dan terdiri dari Marxisme-Leninisme-Gorbachevisme. Apa yang dilakukan Gorbachev sebenarnya adalah pemurnian dan pengembangan komunisme sesuai dengan tuntutan jaman. Pemurnian ideologi menyangkut pelaksanaan sentralisme Demokrasi dan tradisi pembersihan, sementara pengembangan ideologi terlihat dari perubahan yang telah disetujui dari sistem Partai Tunggal menjadi sistem Multipartai dan deideologisasi. Menurut Demokrasi sentralisme, semua keputusan harus berdasarkan prinsip pengambilan bottom up bukan top down. Kenyataannya yang berlaku di Uni Soviet top down. Akibatnya timbul kesemena-menaan di pihak penguasa dan skeptisisme di pihak rakyat. Keadaan ini telah menghancurkan ekonomi Uni Soviet. Di pihak lain menimbulkan degradasi moral, baik di kalangan elite maupun di kalangan rakyat Uni Soviet. Gorbachev merasa terpanggil memperbaiki keadaan dengan melemparkan kebijakan Perestroika yang bertumpu pada Glasnot.[32] Sistem diktator proletariat sebagai alat untuk mencapai tujuan melalui rekayasa dari atas secara empiris justru terbukti menciptakan suasana kehidupan sosial politik dan ekonomi yang cenderung menyengsarakan rakyat banyak. Rezim komunis yang totaliter hanya mampu bertahan dengan mengandalkan jasa polis rahasia, terror, dan merangsang kebencian terhadap lawan politik.[33]

Keberanian Gorbachev dalam melakukan perubahan telah memukau dunia. Gagasan Gorbachev tentang perombakan struktur hubungan internasional, khususnya hubungan Timur Barat, terlalu bertubi-tubi datangnya, sehingga AS dan sekutunya tidak sempat mencerna. Landasan, validitas, dan relevansi strategi globalnya menjadi goyah. Konfrontasi fisik yang berlangsung sejak Oktober 1917 yang tampaknya lenyap selama Perang Dunia II tetapi bergejolak setelah itu, seolah mencair. Kembali Gorbachev mengalah demi perdamaian dunia. Apakah dia insyaf bahwa selama ini memang Soviet yang salah? Dia yang muncul sejak tahun 1985 menyadari tentang lemahnya posisi global Uni Soviet, terutama sejak tahun terakhir kekuasaan Brezhnev. Uni Soviet semakin merosot kecuali dalam bidang militernya saja. Mengapa? Karena sistem politik, ekonomi, dan sosialnya ternyata tidak mampu menggali dan mengembangkan kekuatan yang terpendam dalam pribadi, masyarakat, bangsa, dan alamnya. Prakarsa, kompetisi, dan kemandirian tidak mendapat tempat di dalamnya. Perestroika tidak bermaksud menggantikan sistem dan ideologi lama dengan yang baru, tetapi sasaran utamanya adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem nasional. Sosialisme, Marxisme/ Leninisme tetap menjadi landasan hidup.[34]

Menurut Robert F. Byrnes[35], penghambat perubahan Uni Soviet dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kekuatan militer dan politik Luar Negeri yang bersama-sama memberikan legitimasi bagi sistem Uni Soviet dan menjadi instrumen kekuasaan. Hal ini juga diperkuat oleh keinginan untuk mencegah perang nuklir

- dengan mempertahankan dan memperkuat kekuatan sendiri. Keunggulan militer dan politik Luar Negeri selalu ditekankan karena Uni Soviet mendapat keuntungan dari campur tangan dan perluasan pengaruh.
2. Hambatan ideologis bagi perubahan internal. Penguasaan Uni Soviet meyakini hanya partailah sebagai barisan depan kaum proletar yang berhak dan mampu menentukan kebijakan dan menggerakkan masyarakat sesuai dengan jalan yang telah dipilih.
 3. Karakter masalah domestik yang dihadapi Uni Soviet memiliki akar sejarah yang panjang.
 - d. Melambatnya pertumbuhan ekonomi yang sangat kompleks, tersentralisir, dan kekerasan serta keputusan yang sukar mengenai alokasi sumber daya.
 - e. Penurunan dalam industri karena perencanaan dan pengendalian yang berlebihan, masalah tenaga kerja, dan produktivitas menurun.
 - f. Ketidakmampuan negara memberi barang konsumsi yang memadai bagi kelas pekerja yang memiliki uang tetapi tidak mampu membeli apa-apa.
 - g. Pertanian yang buruk karena sistem pertanian kolektif dan manajemen yang tersentralisir.
 - h. Masalah infrastruktur sistem sosial: perumahan tidak memenuhi standar, pelayanan kesehatan yang buruk, dan kecenderungan demografi yang tidak menguntungkan
 - i. Kebudayaan politik formal, kaku, dan tak toleran. Ketidakstabilan yang inheren dari Eropa Timur yang dianggap sebagai bagian penting sistem mereka.
 - j. Akibat indoktrinasi dan kontrol yang ketat, pengambilan keputusan dan manajemen terpusat, memberi imbalan bagi yang taat ideologi dan hukuman bagi yang inovatif atau independen, sangat sulit memberikan energi pada masyarakat dan mendorong inisiatif dan individualitas.
 - k. Sistem Uni Soviet pada dasarnya menjadi sistem yang paling konservatif dan satu-satunya yang paling tidak toleran terhadap perubahan. Mereka berkuasa hanya memikirkan kepentingan pribadi. Sistem bersifat immobil dan beku.

Itulah sebabnya, tidak mudah bagi Gorbachev untuk melakukan program Perestroika dan Glasnotnya secara sempurna. Mengapa? Karena Perestroika dan Glasnot tidak didorong oleh hasrat murni demi perdamaian dan kesejahteraan *an sich* melainkan karena dipaksa oleh keperluan mendesak untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang semakin parah. Padahal, dalam perbaikan tersebut dibutuhkan situasi yang tenang dan dibutuhkan kompromi-kompromi sosial politis. Maka tidak heran bila tiga tahun setelah Gorbachev berkuasa tidak ada tanda-tanda perbaikan. Kesejahteraan rakyat menurun, inflasi meningkat (7-8%), defisit anggaran mencapai 11% dari PDB dibanding dengan hanya 3% di Amerika Serikat. Sasaran inti Perestroika adalah desentralisasi ekonomi, ternyata justru menimbulkan berbagai kesulitan. Mengapa? Karena sentralisasi sudah puluhan tahun mendarah daging. Sistem yang lama dilepas, tetapi sistem yang baru masih kabur. Penyakit kronis Uni Soviet adalah: kepatuhan pasif, ketergantungan, kemandirian dan kewiraswastaan yang lemah, dan sistem komando yang kuat. Akhirnya muncul kekeburan pengertian dan kecurigaan. Pihak-pihak yang mementingkan perubahan semakin kuat. Sementara Gorbachev menghadapi kondisi sosial politik ekonomi yang memburuk karena sistem yang korup, otoriter, dan monolitik selama tujuh dasawarsa.[36]

E. Indonesia: Revolusi dan Disintegrasi Sedang Mengancam?

Bagaimana dengan Indonesia? Setelah pemerintah otoriter Orde Baru tumbang pada tahun 1998, krisis multisegi tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tampaknya sampai sekarang pun belum ada tanda-tanda bahwa krisis ini akan segera berakhir. Ketidakpastian ekonomi, politik, hukum, masih berlangsung hingga sekarang. Dampak dari krisis adalah munculnya berbagai tindak kekerasan, disorganisasi, dan ancaman disintegrasi bangsa. Apakah ancaman disintegrasi bagi bangsa Indonesia ini juga diperkuat oleh peristiwa runtuhnya negara Adikuasa Uni Soviet pada akhir Perang Dingin? Atau akankah revolusi akan terjadi di Indonesia? Bagaimana kajian kemiripan-kemiripan historis yang berlangsung di Rusia dan Uni Soviet bisa ditelaah untuk analisis bagi Indonesia?

Pola-pola dan trend yang sama sebenarnya juga tengah berlangsung di Indonesia, mirip ketika pola dan trend itu terjadi di Rusia dan Uni Soviet. Sebelum Revolusi Rusia 1917 berlangsung, sistem pemerintahan yang diktator, otoriter, dan menyengsarakan rakyat tengah berlangsung. Muncullah segala usaha dan gerakan untuk melawan dan menumbangkan

pemerintah. Berbagai kelompok sosial muncul untuk melakukan koreksi dan kritik di bawah tekanan pemerintah, namun lama-lama usaha demokratis mereka berhasil dan mampu menelorkan perubahan politik berupa karya besar revolusi.

Bagi Indonesia, periode pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto selama 32 tahun telah menyebabkan negara ini menjadi bersifat totaliter, otoriter, dan menerapkan politik yang regimentatif, sehingga berbagai kebijakan yang tidak demokratis diterapkan kepada rakyat. Kebekuan suara demokratis juga berlangsung selama ini. Perubahan mulai terasa ketika muncul kelompok-kelompok demokrat yang berusaha untuk melakukan kritik kepada pemerintah. Akan tetapi mereka juga mengalami tindakan terror dan berbagai kekerasan politik lain seperti penculikan, pembunuhan, pemenjaraan yang tidak adil, dan sebagainya. Namun demikian, kelompok-kelompok ini terus melakukan perjuangan dengan dukungan dari para mahasiswa, intelektual, pers, LSM, dan kelompok-kelompok lain untuk menumbangkan pemerintahan korup Orde Baru. Pada periode ini pola dan trend sebagaimana terjadi di Rusia sebelum Revolusi dan masa Pemerintahan Terror tampaknya juga berlangsung di Indonesia.

Apabila di Rusia menelorkan karya besar sebuah Revolusi, maka di Indonesia menghasilkan karya monumental bukan berupa revolusi tetapi berupa reformasi. Reformasi pada tahap seperti sekarang ini sebenarnya belumlah bisa dikatakan sebagai revolusi, karena perubahan-perubahan mendasar dan radikal terhadap seluruh sistem tidak berlangsung. Reformasi yang sekarang terjadi hanyalah sebatas menumbangkan pemimpin Orde Baru-nya saja. Ibaratnya, reformasi di Indonesia baru memenggal kepala, tetapi seluruh tubuh pada dasarnya masih merupakan produk lama.

Akankah situasi yang berkembang sekarang ini akan menjadi sebuah revolusi? Apabila pola-pola yang sama berlangsung, maka dimungkinkan akan terjadi revolusi. Namun yang lebih tepat dalam analisis ini adalah kemungkinan munculnya pemerintahan yang diktator, karena terjadi krisis yang berkepanjangan disertai dengan anarki dimana-mana, sudah barang tentu akan memungkinkan munculnya pemerintah diktator. Sebagaimana dikatakan oleh Bung Hatta, bahwa perkembangan politik yang berakhir dengan kekacauan, demokrasi yang berakhir dengan anarki, telah membuka jalan untuk lawannya: diktator. Kondisi Indonesia sekarang ini sungguh diambang anarki menyeluruh.

Selain itu ketidakpuasan dari beberapa golongan di luar pemerintah yang sekarang semakin bersuara keras kepada pemerintah juga akan berpengaruh terhadap terjadinya perubahan politik menuju kemenangan golongan radikal. Bila golongan ini menang, maka bukannya tidak mungkin golongan yang berkuasa ini akan memerintah secara diktator dengan alasan untuk mengatasi segala krisis dan anarki yang berlangsung ini. Sekarang sudah mulai tampak bahwa muncul koreksi-koreksi dari berbagai institusi non formal bahkan mengeluarkan statement yang kritis yang kemudian disampaikan kepada lembaga DPR. Meskipun belum sampai pada tahap menjadi sebuah kebijakan yang bisa diaplikasikan kepada rakyat, akan tetapi pengaruhnya akan semakin nyaring menuju ke suatu suasana munculnya lembaga-lembaga tandingan yang bisa menjelma menjadi "pemerintah ekstra formal", termasuk di dalamnya tentunya "ekstra parlemen" yang sekarang bisa kita lihat dengan marak.

Kerumitan-kerumitan akibat warisan rejim lama menjadi kelemahan golongan pemerintah sekarang. Apabila pemerintah sekarang tidak bisa mengatasi krisis ini, maka ia akan dicap sebagai tidak becus, penerus orde lama, dan bahkan telah menyuburkan apa yang selama ini diagendakan. Mereka dianggap telah berkhianat terhadap reformasi, seperti ketika di Rusia golongan Radikal mencap golongan konservatif sebagai pengkhianat revolusi.

Tentang kekhawatiran munculnya disintegrasi bangsa saat ini, adalah sesuatu yang wajar. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pada nilai-nilai yang dipropagandakan regime lama dalam menggalang persatuan. Nilai-nilai lama itu mengandung paksaan bahwa orang harus bersatu dan seragam. Sementara keragaman sosial budaya bangsa Indonesia menjadi fakta yang tidak bisa dielakkan. Oleh karena itu, ada kesamaan pola tentang setting historis bangsa

Indonesia dengan bangsa Rusia, terutama tentang keragaman etnis yang ada dan bahasa serta budaya yang beragam. Faktor kedua adalah bahwa bila pemerintah sekarang melupakan beberapa unsur pendukung persatuan negara, maka disintegrasi bisa terjadi. Bagi Uni Soviet, Gorbachev telah meninggalkan dan melupakan peran komponen penting, yaitu: buruh, militer, birokrat, dan intelijen negara. Nah, untuk Indonesia, sebaiknya keempat komponen ini jangan ditinggalkan, apalagi disakiti. Jadi apapun alasannya, mereka tetap penting bagi proses integrasi bangsa dan nation building.

Pada mulanya Gorbachev berusaha untuk menerapkan desentralisasi ekonomi kepada daerah, namun demikian karena fundamental ekonomi Uni Soviet yang lemah, maka yang terjadi justru ketidakpuasan dari negara-negara bagian, sehingga mereka ingin melepaskan diri. Sama halnya dengan Indonesia, sekarang ini fundamental ekonomi Indonesia saat ini sangat tidak mendukung adanya penerapan otonomi daerah. Banyak masalah yang harus dikerjakan dan diperbuat oleh daerah maupun pusat untuk mengatur semuanya agar tidak terjadi kesulitan pembagian keadilan.

Akan tetapi, sebenarnya disintegrasi baru akan terjadi apabila telah melampaui pemerintahan yang otoriter, sentralistik sebagaimana telah berlangsung di Uni Soviet. Saat ini, kalau di Indonesia berlangsung suatu pemerintahan yang diktator, maka dalam waktu yang tidak lama akan muncul disintegrasi. Akankah demikian? Mari kita berdiskusi lebih lanjut.

F. Penutup

Demikian makalah singkat pengantar diskusi ini. Tidak ada yang bisa secara pasti dapat disimpulkan, karena semua masih merupakan prediksi. Namun yang jelas, bahwa kemiripan-kemiripan pola, trend, kecenderungan dari perkembangan sistem sosial politik, ekonomi, dan budaya dari suatu masyarakat akan bisa digunakan untuk analisis bagi suatu masyarakat lain.

* Makalah disampaikan pada Seminar Internasional Hubungan Rusia-Indonesia dalam Kajian Sejarah, Semarang Universitas Diponegoro, tanggal 16 November 2000

** Drs. Indriyanto, S.H., M.Hum., Staf Edukatif Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Semarang.

[1] Djoko Suryo, "Memutar Jarum Sejarah "Kembali ke Masa Depan": Integrasi Bangsa Indonesia Baru", makalah pada Seminar Internasional Lustrum VII Fakultas Sastra UNDIP Semarang 15-16 September 2000

[2] Secara geografis, tiga per empat wilayah Rusia Soviet ada di Asia, sehingga ada pendapat bahwa kebijakan Moskwa atas Asia identik dengan kebijakan domestik Soviet. Dalam pendekatan sejarah dan budaya, istilah Asia menjadi kabur karena pada kenyataannya tradisi Rusia berakar pada tradisi Eropa. Diawali dari Kristianisasi pada abad ke-10, dilanjutkan peperangan melawan Proturki, Yahudi, dan Muslim. Pertarungan terpenting dan paling traumatis sampai sekarang adalah penaklukan Rusia oleh Mongol pada pertengahan abad ke-13. Dieter Heintz, "Rusia dan Uni Soviet di Asia", dalam *Analisa* 1983-12 (Jakarta: CSIS, 1983), hlm. 1051.

[3] Meskipun Rusia sebenarnya imperialis, Rusia Soviet mampu menghindari tuduhan sebagai kolonialis dan bahkan sering diklasifikasikan sebagai non-kolonialis, karena: 1) terjadinya pengintegrasian wilayah jajahan dilakukan melalui ikatan ekonomi yang erat dengan negara induk; 2) Kolonialisme Rusia telah "menyimpang" dari pola kolonialisme klasik yang umumnya bersifat maritim, sedangkan yang dilakukan Rusia bersifat kontinental. Heintz, "Rusia...", dalam *ibid.*, hlm. 1056.

[4] *Ibid.* Baca juga: Wayne S. Vucinich (ed.), *Russia and Asia, Essays on the Influence of Russia on the Asian Peoples* (Stanford, California, 1972); James Buynyan and H.H. Fisher, *The Bolshevik Revolution 1917-1918* (Stanford, California, 1943)

[5] Theda Skocpol, *Negara dan Revolusi Sosial Suatu Analisis Komparatif tentang Prancis, Rusia, dan Cina* (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm.83.

[6] Baca: Theofanis George Stevrou, *Russian Under the Last Tsar* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1969), dalam *ibid.*, hlm. 84. Rangkaian peristiwa yang membawa kekaisaran Rusia dari dominan di Eropa setelah Revolusi 1848 menjadi disintegrasi dan Revolusi 1917 berawal dari kekalahan dalam

Perang Crimean 1854-1855. Perang itu bersumber dari kontrol atas Laut Hitam dan pengaruh di kekaisaran Ottoman. Rusia berhadapan dengan Prancis dan Inggris tanpa dukungan bekas sekutunya Austria. Armada Rusia tidak dapat menyaingi kapal mesin uap dari skuadron sekutu yang sangat kuat.

[7] Di dalam teorinya Marx menentang penghapusan hak pribadi secara total yang harus dihapus, bukannya setiap milik pribadi, tetapi milik pribadi yang merupakan *manifestasi L'exploitation de L'homme par L'homme* saja. Penghapusan ini saja harus menghindari pertentangan antara individu dan masyarakat. Marx berpendapat bahwa di mana tak ada kebebasan individu, maka tak ada pula kebebasan masyarakat. Postulat ini bertentangan dengan kenyataan Rusia masa Stalin, dimana tak ada kebebasan individu, meskipun hal ini merupakan warisan kebudayaan Rusia Prarevolusioner dimana agama yang memuja patung paralel dengan kebudayaan kepada Tsar. Ketika Albert Camus pada tahun 1951 mengatakan bahwa semua Revolusi Modern berakhir dengan diperkuatnya kekuasaan negara, tetapi di Rusia, Revolusi 1917 berakhir dengan kuatnya kekuasaan Stalin. Baca: Dwi Susanto & Zainuddin Djafar (ed), *Perubahan Politik di Negara-negara Eropa Timur* (Jakarta; Gramedia, 1990), hlm. 4-7.

[8] Theda Skocpol, *op cit.*, hlm. 51. Tentang konsep Imperial State sebagai suatu tipe negara, baca: Frances V. Moulder, *Japan, China, and Modern World Economy* (Cambridge University Press, 1977)

[9] *Ibid.*, hlm. 86. Rakyat Rusia dalam sejarahnya berasal dari berbagai wilayah, seperti bangsa Varangia dari Skandinavia yang menciptakan bentuk tertua dari evolusi politik Rusia. Selain itu juga ada bangsa Bulgaria yang sebagian menjadi perintis bangsa Tartar, Gotik, dan Slavia. Baca: Rushton Coulborn (ed), *Feudalism in History* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1956), hlm. 345-346.

[10] Metode-metode kekerasan biasanya digunakan kalau cara-cara memperoleh perubahan pemerintah tidak efektif. Pernah dikatakan bahwa Tahta Rusia sampai abad ke-17 bukan turun temurun bukan pula pilihan, melainkan "jabatan". Serangkaian panjang penurunan tahta Rusia yang dipaksakan oleh tuan-tuan tanah Boyar dan oleh "Pasukan Panah" Pengawal Kerajaan telah melemahkan asas keturunan, sehingga siapapun yang merampas tahta menjadi Tsar, tidak mempedulikan lagi masalah keturunan. Baca: Edward Luttwak, *Kudeta Teori dan Praktek Penggulingan Kekuasaan* (Jakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1999), hlm. 17.

[11] Sel yang semula kecil ini kemudian berkembang dalam kehidupan masyarakat, dan setelah berhasil memperlihatkan kekuatannya, barulah penguasa *the old regime* sadar bahwa ada kekuatan maha dahsyat yang mengancam mereka. Dia telah berakar dalam kehidupan sosial dan berhasil menstimulir munculnya kesadaran kelas untuk bangkit memperjuangkan hak-hak mereka yang selama ini ditindas oleh sistem politik dan feodalisme dari *the old regime*. Hamid Abdullah, "Sel Revolusi", dalam *Lembaran Sastra* No. 8 tahun 1984-1985, hlm. 168.

[12] Skocpol, *op.cit.*, hlm. 36-37, 82.

[13] Deliar Noor, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 169.

[14] Pemerintahan sementara pertama dipegang oleh Pengeran Lvov yang terdiri dari golongan kadet, sayap kiri, dan kelas menengah dalam sistem lama. Dua bulan kemudian digantikan oleh Partai Menshevik dan sosialis revolusioner karena pemerintah sebelumnya dinilai sangat kompromis dengan imperialisme. Golongan Bolshevik tidak mau ambil bagian dalam pemerintahan. Mereka menghendaki revolusi borjuis yang segera diikuti oleh revolusi proletar seperti ramalan Marx. Di bawah Lenin dan Trotsky diputuskan untuk mengadakan pemberontakan. Pada akhirnya Revolusi Proletar dapat dilancarkan di Petrograd dengan tanpa aliran darah. Baca selengkapnya: Crane Brinton, *The Anatomy of Revolution* terjemahan SL Hadipranowo (Jakarta: Bhratara, 1962), hlm. 159-160.

[15] Theda Skocpol, *op.cit.*, hlm. 228-230.

[16] Golongan moderat hanya punya tiga pilihan : 1) menekan pemerintahan tidak sah/ ekstrimis; 2) menguasai pemerintahan tidak sah; 3) membiarkan hidup pemerintahan tidak sah. *Ibid.*, hlm. 161-167.

[17] Soviet berarti dewan-dewan yang mencakup dewan lokal serikat sekerja, serdadu, pelaut, petani, dan cendekiawan. Bolshevik memusatkan diri pada sosiet-soviet ini, sehingga akhirnya dapat merebut kekuasaan atas soviet-soviet yang memiliki kedudukan kunci di Petrograd, Moskwa, dan kota-kota industri lainnya.

[18]. Setelah kematian Lenin, perselisihan antara golongan ekstrimis menjadi semakin terbuka. *Ibid.*, hlm. 182, 201, 201.

[19] Alexandre A. Bennigsen & S. Enders Wimbush, *Muslim National Communism in the Soviet Union A Revolutionary Strategy for the Colonial World* (Publication of the Centre for Middle Eastern Studies, No. 11. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1979), hlm. 32-34. Rupanya pandangan tentang partai antara Marx dan Lenin berbeda. Marx berpendapat bahwa partai harus besar, mempunyai massa yang banyak dan dipimpin oleh orang-orang komunis yang mempunyai pengetahuan luas. Sementara

Lenin berpendapat bahwa partai harus kecil, mempunyai persatuan yang bulat yang anggotanya terdiri dari orang-orang revolusioner (partai kader). Partai inilah yang memimpin perjuangan golongan pekerja dan kaum buruh yang memberikan arah partai itu. Partai seperti itulah yang merupakan alat ampuh untuk meruntuhkan kekuasaan Tsar Rusia. Pendirian Lenin inilah yang menyebabkan Partai Sosial Demokrat Rusia pecah menjadi dua, yaitu: golongan Bolshevik (mayoritas) dan golongan Menshevik (minoritas). Golongan Partai Bolshevik dipimpin oleh Lenin (1903). Pada tahun 1918 golongan ini berkembang menjadi Partai Komunis. Deliar Noor, *op.cit.*, hlm. 177-178.

[20] Pemerintah diktator muncul karena pemerintah tidak hanya harus menyelesaikan persoalan-persoalan biasa, tetapi juga Perang Saudara, melawan negeri asing, dan berbagai tindakan pembaharuan di bidang ekonomi. Brinton., *ibid.*, hlm. 206-207.

[21] Dalam hal ini kekuasaan politik merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Baca selengkapnya: Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta:Gramedia, 1983), hlm. 37; F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Binacipta, 1978), hlm. 105-123.

[22] Tentang penggunaan dan pengembangan kekuasaan militer, polisi, atau kekuasaan kriminal dengan kontrol yang sangat kuat terhadap kekerasan merupakan hal utama. Baca: Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 275.

[23] Karl G. Ballestrem, "Totalitarian systems invite inefficiency and corruption", dalam *The Jakarta Post*, Monday, October 7, 1991.

[24] Alfian, "Pembaharuan Gorbachev: Makna Ideologis dan Dampaknya di Uni Soviet dan Eropa Timur", dalam Dwi Susanto dan Zaenuddin Djafar (ed), *op.cit.*, hlm. 60,63.

[25] Aswab Mahasin, "Negara dan Kuasa" dalam *Prisma* No.8 tahun 1984 (Jakarta:LP3ES), hlm. 2.

[26] Daniel Yergin pada tahun 40-an memunculkan pertanyaan besar: "apakah Uni Soviet merupakan negara yang berbakti pada suatu ideologi ataukah suatu ideologi yang berbakti pada negara?" Reaksi terhadap Uni Soviet di Amerika Serikat dibedakan menjadi dua madzab, yaitu: Mazhab Riga (lingkungan Kementerian Luar Negeri AS), yang menganggap Uni Soviet bertanggungjawab atas Resolusi Dunia dan ekspansinya yang tidak terbatas, sehingga memandang penting peran ideologi Marxisme-Leninisme sebagai ancaman. Kedua Madzab Yalta (Muncul dari pemikiran F.D. Roosevelt) yang didukung oleh lingkungan Gedung Putih. Mereka menganggap wajar US dengan agresivitasnya itu merupakan kebutuhan akan jaminan keamanan wilayahnya. CPF Luhulima, *Eropa sebagai Kekuatan Dunia, Lintasan Sejarah dan Tantangan Masa Depan* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 219-221.

[27] Meskipun sama sekali tidak demokratis dengan menindas kaum oposan dengan kejam (era Lenin berlangsung selama beberapa tahun setelah dia meninggal tahun 1923) tetapi banyak eksperimen sosial budaya yang terjadi (seni, teknik, ekonomi, politik, kehidupan intelektual) dengan semangat inovasi dan kreativitas yang tinggi. Zbigniew Brzezinski, *Kegagalan Besar Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam Abad Keduapuluh* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 13-16.

[28] *Ibid.*, hlm. 30-31.

[29] *Ibid.*, hlm. 27

[30] CPF Luhulima, *op.cit.*, hlm. 13.

[31] Brzezinski, *op.cit.*, hlm. 27, 36,37, 48.

[32] Beda perjuangan komunis sebelum dan sesudah deideologisasi adalah ditundanya perjuangan yang disertai kekerasan dan diganti dengan perlombaan agar masyarakat yang non-komunis mau menerima komunisme atas dasar pilihan. Seandainya Gorbachev berhasil di bidang ekonomi, maka keberhasilan itu akan merupakan senjata yang ampuh untuk penyebaran komunisme ke seluruh dunia pada abad mendatang. Dwi Susanto & Zaenuddin Djafar (ed), *op.cit.*, hlm. 21-25.

[33] Alfian, "Pembaruan Gorbachev...", dalam *ibid.*, hlm. 65.

[34] A.Hasnan Habib, "Perestroika, Glasnost, dan Dilema AS", dalam *Kompas*, Selasa 17 Januari 1989

[35] Robert F Byrnes, "Perubahan dalam Sistem Politik Soviet", dalam Roy C Maeridis dan Bernard E. Brown (ed), *Perbandingan Politik: Catatan dan Bacaan* (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 214-221)

[36] A.Hasnan Habib, "Perestroika, Glasnost,...", dalam *Kompas*, Selasa 17 Januari 1989